

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda bahwa variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai signifikan 0,000 dan nilai koefisien regresi 0,533. Dari hasil analisis regresi linear berganda maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Makassar artinya hipotesis H1 diterima. Dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik bertujuan agar terhindar dari kecurangan yang mungkin bisa terjadi dalam melakukan pelaporan keuangan agar tercipta laporan keuangan yang andal sehingga semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar.
2. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda bahwa variabel transparansi memiliki nilai signifikan 0,001 dan nilai koefisien regresi 0,140. Dari hasil analisis regresi linear berganda maka dapat disimpulkan

bahwa hipotesis kedua yaitu transparansi berpengaruh secara positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Makassar artinya hipotesis H2 diterima. Pelaksanaan transparansi pada pemerintah Kota Makassar dengan bantuan oleh teknologi informasi semakin mempermudah pemerintah dalam melakukan pengumuman kepada publik mengenai pengelolaan sumber daya publik melalui *platform digital*. Sehingga semakin baik pelaksanaan transparansi pemerintah Kota Makassar maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar.

3. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai signifikan 0,000 dan nilai koefisien regresi 0,330. Dari hasil analisis regresi linear berganda maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yaitu kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Makassar artinya hipotesis H3 diterima. Setiap peran dan fungsi yang dijalankan oleh aparat pegawai Kota Makassar telah sesuai dengan fungsi akuntansi dalam pengelolaan keuangan. Dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang baik, pemerintah Kota Makassar telah memberikan materi pelatihan kepada pegawai dalam pengelolaan keuangan setiap instansi. Semakin berkompeten sumber daya manusia pada pemerintah Kota Makassar maka akan semakin berkualitas juga laporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem pengendalian internal, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Makassar telah sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesis yang telah dibangun dalam penelitian ini. Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berada pada interval kelas dengan kategori sangat setuju dan transparansi berada pada kategori setuju maka adanya penerapan sistem pengendalian, pelaksanaan transparansi dan adanya sumber daya manusia yang berkompeten akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar.

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini telah menunjukkan adanya kesamaan dari beberapa hasil penelitian terdahulu. Hasil uji variabel sistem pengendalian internal selaras dengan penelitian Triyanti (2017), hasil uji variabel transparansi selaras dengan penelitian Amalia (2017), dan hasil uji variabel kompetensi sumber daya manusia selaras dengan penelitian Triyanti (2017), Asril (2017) dan Wardani (2017).

5.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan walaupun peneliti telah mengupayakan sebaik mungkin. Berikut adalah beberapa keterbatasan dalam penelitian:

1. Adanya kuesioner yang tidak kembali sejumlah 19 kuesioner dari total 156 kuesioner yang disebar. Hal ini disebabkan karena padatnya kegiatan para

responden seperti tugas ke lapangan dan banyaknya pekerjaan yang dilaksanakan sehingga kurangnya waktu dalam mengisi kuesioner.

2. Adanya kebijakan pemerintah Kota Makassar kepada setiap OPD untuk bekerja dari rumah secara terjadwal sehingga beberapa responden tidak dapat mengisi kuesioner yang disebar di setiap kantor OPD.
3. Jarak kantor antar OPD yang satu dengan yang lain cukup jauh sehingga dalam penyebarannya cukup menghabiskan banyak waktu menyebabkan penyebaran kuesioner yang cukup lama.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut.

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel atau dapat menggunakan variabel lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan apabila ingin melakukan penelitian yang sejenis. Peneliti juga dapat menggunakan objek yang berbeda sehingga dapat mengetahui apakah penelitian ini dapat berpengaruh jika diuji pada objek yang berbeda.
2. Bagi pemerintah Kota Makassar dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pengelolaan keuangan untuk memperhatikan faktor seperti sistem pengendalian internal, transparansi serta kompetensi sumber daya manusia agar dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Diharapkan juga agar pemerintah Kota Makassar dapat menindaklanjuti laporan hasil

temuan BPK apabila terdapat ketidakwajaran sehingga dapat dibenahi dan mampu menciptakan pemerintah yang transparan dalam pengelolaan keuangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, N. (2007). *Good E-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Azhar (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- Amalia, R. (2017). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Transparansi, Pelatihan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- Asril, M. Y. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- Edison, E., Anwar, Y., & Komariyah, I. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Fathoni, A. (2006). *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: BP UNDIP.
- Harahap, S. S. (2009). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hartono, J. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- _____. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Hutapea, P., & Thoha, N. (2008). *kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3 No. 4.

- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- _____. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Media Indonesia. (2021, Mei 19). *Wali Kota Makassar Kecewa Hasil Laporan Keuangan Buruk*. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/nusantara/405920/wali-kota-makassar-kecewa-hasil-laporan-keuangan-buruk>.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalia Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 (IAI, 2015) tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- Septiningtyas, T. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Soemarsono, S. R. (2004). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suara Sulsel.id. (2021, Mei 19). *Kacau! BPK Temukan Rp 450 Juta Utang Pribadi di Rumah Sakit Daya Makassar*. Retrieved from <https://sulsel.suara.com/read/2021/05/19/131816/kacau-bpk-temukan-rp-450-juta-utang-pribadi-di-rumah-sakit-daya-makassar?page=all>.

- Sumarsono, H. (2009). Analisis Kemandirian Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol.1 No. 1.
- Sunyoto, D. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Buku Seru.
- Triyanti. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Magelang)*. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Wardani, D. Y. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Labuhanbatu*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.